

PARADOKS KELUARGA SAKINAH: RELASI KUASA DAN WACANA PATRIARKI

Indri Muflikhatul Khoiriyah¹, Masngudi², Qoyad Mahardhikasih³

¹Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang, Jawa Tengah

³Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email correspondence: indrimuflikhatul@gmail.com

Article History:

Received: 2025-02-12, Accepted: 2025-02-12, Published: 2025-02-27

Abstract

This article discusses the paradox of the concept of the sakinah family, an ideal of a harmonious household in Islam based on justice and compassion. In practice, however, this concept is often constructed within a patriarchal Islamic discourse that positions men as absolute leaders and women as subordinates. This discourse is reinforced by interpretations of religious texts, culture, and tradition, perpetuating gender bias that place women in a subordinate position. The research method used is a literature study with a critical discourse analysis approach, while the theories of Antonio Gramsci's hegemony and Michel Foucault's power relations are used to analyze how the concept of a sakinah family functions as a control tool that maintains male dominance in the household. It also examines how women negotiate this discourse in their daily lives, either through acceptance, adaptation, or resistance. The results show that patriarchal discourse is manifested in an emphasis on women's obedience and men's leadership, which often normalizes inequality. Women are supervised not only by their husbands but also by society, creating a self-surveillance. The Islamic feminist movement challenges this discourse by offering a more inclusive interpretation.

Keywords: *The sakinah family, Power Relation, Patriarchy*

Abstrak

Penelitian ini mendiskusikan paradoks konsep keluarga sakinah, sebuah cita-cita rumah tangga harmonis dalam Islam yang berlandaskan keadilan dan kasih sayang. Akan tetapi dalam praktiknya, konsep ini seringkali dikonstruksi dalam wacana Islam patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin mutlak dan perempuan sebagai individu yang harus patuh. Wacana ini diperkuat oleh interpretasi teks agama, budaya, dan tradisi, sehingga melanggengkan bias gender yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan analisis wacana kritis, adapun teorinya adalah hegemoni Antonio Gramsci serta relasi kuasa Michel Foucault digunakan untuk menganalisis bagaimana konsep keluarga sakinah berfungsi sebagai alat kontrol yang mempertahankan dominasi laki-laki dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana perempuan bernegosiasi dengan wacana ini dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui penerimaan, adaptasi, maupun resistensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana patriarkal termanifestasi dalam penekanan pada kepatuhan istri dan kepemimpinan suami, yang seringkali menormalisasi ketimpangan. Perempuan tidak hanya diawasi oleh suami, tetapi juga oleh masyarakat, menciptakan *self-surveillance*. Gerakan feminisme Islam menantang wacana ini dengan menawarkan interpretasi yang lebih inklusif.

Kata kunci: Keluarga Sakinah, Relasi Kuasa, Patriarki

PENDAHULUAN

Konsep keluarga sakinah merupakan salah satu konsep ideal dalam Islam yang menggambarkan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan didasarkan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama. Ideal ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri, serta pemenuhan kebutuhan spiritual, emosional, dan

material seluruh anggota keluarga. Namun, dalam praktiknya, konsep ini sering kali dikonstruksi dalam wacana Islam patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin mutlak dan perempuan sebagai individu yang harus tunduk dan patuh. Selain itu, konsep keluarga sakinah sering kali mengalami distorsi dan reduksi makna akibat pengaruh wacana Islam patriarkal yang masih dominan di banyak masyarakat Muslim. Narasi ini tidak hanya dikukuhkan oleh teks-teks agama tetapi juga diperkuat melalui budaya dan tradisi yang berkembang di masyarakat Muslim (Ahmed, 2021). Akibatnya, nilai-nilai yang diidealkan dalam keluarga sakinah dapat mengalami bias gender yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.

Wacana patriarkal ini mengkonstruksi keluarga sakinah sebagai entitas hierarkis di mana laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin mutlak (*qawwam*) dan perempuan sebagai individu yang harus tunduk, patuh, serta sepenuhnya bergantung pada suami (Barlas, 2009). Barlas berpendapat bahwa penafsiran tradisional ini telah mengkonstruksi keluarga sakinah sebagai entitas hierarkis, di mana laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin mutlak dan perempuan diwajibkan untuk tunduk dan patuh. Namun, Barlas menekankan bahwa pemahaman semacam itu merupakan hasil dari interpretasi yang bias gender dan tidak mencerminkan esensi egaliter yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dia mendorong pembacaan ulang teks-teks suci dengan perspektif yang lebih adil dan setara, guna membebaskan perempuan dari konstruksi patriarkal yang telah mengakar dalam tradisi penafsiran Islam (Barlas, 2009). Narasi ini dikukuhkan melalui interpretasi selektif terhadap teks-teks agama serta diperkuat oleh budaya dan tradisi yang berkembang di masyarakat Muslim selama berabad-abad. Akibatnya, nilai-nilai yang diidealkan dalam keluarga sakinah, seperti keadilan, kesetaraan, dan musyawarah, seringkali terabaikan atau diabaikan demi mempertahankan dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan.

Sejarah panjang patriarki dalam budaya Islam menunjukkan bahwa dominasi laki-laki atas perempuan telah dilegitimasi dalam berbagai bentuk institusi sosial, termasuk dalam pernikahan, hukum keluarga, pendidikan, dan sistem ekonomi (Mernissi, 1991). Berbagai tafsir klasik dan kontemporer tentang konsep *qiwamah* (kepemimpinan laki-laki) seringkali menekankan otoritas mutlak suami atas istri, sementara perempuan ditempatkan dalam posisi yang lebih pasif, domestik, dan bergantung. Menurut Hidayatullah, interpretasi tradisional seringkali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam struktur keluarga dan masyarakat. Dia juga mengkritisi metode dan pendekatan yang digunakan dalam tafsir feminis, serta menyoroti tantangan yang dihadapi dalam upaya merekonstruksi pemahaman yang lebih egaliter terhadap teks-teks suci (Hidayatullah, 2014). Dalam konteks modern, banyak perempuan Muslim menerima dan bahkan mereproduksi wacana ini, baik karena keyakinan religius yang mendalam, tekanan sosial yang kuat, kurangnya alternatif yang terlihat, maupun internalisasi ideologi patriarkal sejak usia dini.

Sejak awal abad ke-20, muncul gerakan feminisme Islam yang menantang interpretasi patriarkal terhadap teks-teks agama dan berupaya untuk merekonstruksi konsep keluarga sakinah berdasarkan prinsip-prinsip keadilan gender, kesetaraan hak, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Wadud, 1999). Tulisan ilmiah tentang feminisme terus muncul bahkan sejak akhir tahun 1970-an. Namun, belum dapat menjawab masalah yang ada di dalam hiruk pikuk diri kaum feminis itu sendiri. Oleh karena itu, kaum feminis sendiri menyadari bahwa istilah "feminisme" sekarang telah berubah menjadi tragedi. Bahkan hingga akhir tahun 1980-an, orang masih alergi mendengar kata feminisme, apalagi menjadi seorang feminis. Banyak orang masih menganggap feminisme sebagai gerakan perempuan yang menentang laki-laki, menolak perkawinan, dan merusak keluarga, dan masih banyak lainnya (Vianita et al., 2024). Di sisi lain para feminis Muslim menawarkan tafsir alternatif yang lebih inklusif dan egaliter terhadap Al-Qur'an dan Hadis, serta mengkritik praktik-praktik budaya yang merugikan perempuan dalam keluarga dan masyarakat (Rehman et al., 2022).

Di era digital, peran media sosial semakin memperkuat dan memperluas jangkauan konstruksi wacana keluarga sakinah. Media sosial bahkan memainkan peran yang cukup signifikan dalam membentuk wacana tentang keluarga sakinah, baik dari perspektif patriarkal maupun progresif. Misalnya, studi tentang ortodoksi hukum keluarga Islam di ruang digital mengindikasikan bahwa diskursus mengenai pembentukan keluarga Islami berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan media sosial (Ardiansyah, 2024).

Fenomena seputar pernikahan maupun keluarga sakinah kini sudah banyak ditemui di platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok, seringkali menampilkan hiperealitas narasi pernikahan. Seperti halnya tren ‘Marriage is Scary’ ini menunjukkan adanya konstruksi makna baru tentang pernikahan di kalangan Generasi Z yang dipengaruhi oleh media sosial. Meski demikian, Generasi Z yang beragama Islam menghadapi dinamika yang unik karena pemahaman terkait pernikahan tidak hanya dibentuk oleh eksposur media sosial, tetapi juga oleh nilai-nilai agama Islam yang memandang pernikahan sebagai institusi yang luhur dan sakral. Fenomena ini menunjukkan bagaimana hegemoni patriarki terus berkembang dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi, menciptakan bentuk-bentuk baru dari pengawasan sosial terhadap perempuan Muslim (Rahmawati et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana konsep keluarga sakinah dikonstruksi dan direproduksi dalam wacana Islam patriarkal serta bagaimana perempuan menginternalisasi dan/atau menolak ketidaksetaraan ini melalui mekanisme pengawasan dan disiplin sosial (Lazreg, 1994). Dalam penelitian ini, akan ditelaah bagaimana konsep keluarga sakinah berfungsi sebagai alat kontrol yang mempertahankan dominasi laki-laki dalam rumah tangga, sekaligus bagaimana perempuan bernegosiasi dengan wacana ini dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui penerimaan, adaptasi, maupun resistensi. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana gerakan feminisme Islam dan aktivisme digital perempuan Muslim berkontribusi pada transformasi konsep keluarga sakinah menuju visi yang lebih inklusif, berkeadilan gender, dan sesuai dengan nilai-nilai universal Islam tentang keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang.

METODE DAN LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan metode *library research* yang aplikasinya adalah penelitian kepustakaan, dengan menggunakan metode analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis dipilih karena relevan untuk mengungkap dan menggali konstruksi wacana patriarki dalam konsep keluarga sakinah, serta relasi kuasa gender yang tersembunyi di dalamnya (Fairclough, 1995). Keluarga sakinah sebagai sebuah konsep ideal dan praktik relasi kuasa gender merupakan dua hal yang seringkali memiliki jarak, terutama dalam konteks masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai patriarki.

Analisis wacana kritis digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana wacana patriarki memengaruhi interpretasi konsep keluarga sakinah, serta bagaimana relasi kuasa gender direproduksi melalui berbagai teks dan praktik sosial. Parameter ideal keluarga sakinah yang seringkali menekankan kepatuhan istri dan kepemimpinan suami akan dianalisis secara kritis untuk melihat bagaimana wacana ini dapat melanggengkan ketidaksetaraan gender. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini adalah kepustakaan yang memuat kajian tentang keluarga sakinah, patriarki, feminisme Islam, serta media dan konten digital yang relevan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi wacana patriarki dalam keluarga sakinah, memahami bagaimana relasi kuasa gender bekerja dalam konteks tersebut, dan mengidentifikasi bagaimana perempuan bernegosiasi dengan wacana ini dalam kehidupan sehari-hari.

Mengenai landasan teori yang digunakan adalah teori hegemoni Antonio Gramsci dan teori relasi kuasa Michel Foucault, yang relevan untuk menganalisis dinamika kekuasaan dan pengawasan sosial dalam konteks keluarga. Selain itu, kedua teori ini juga memberikan

kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengawasan sosial yang mempengaruhi perempuan dalam konteks keluarga sakinah.

Hegemoni Antonio Gramsci

Teori hegemoni Gramsci memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami bagaimana ideologi dominan, dalam hal ini patriarki, dapat mengakar dalam masyarakat melalui proses konsensus dan penerimaan tanpa pertanyaan. Salah satu spektrum pemikiran Antonio Gramsci adalah konsepsinya tentang hegemoni. Konsepsi hegemoni Gramsci mengacu kepada hubungan antara apa yang disebutnya “*civil society*” dan “*state*” atau negara, di mana keduanya ada pada level superstruktur, sebagaimana Gramsci mengacu kepada pemikiran Marx,

What we can do, for the moment, is to fix two major superstructural ‘levels’: the one that can be called ‘civil society’, that is the ensemble of organisms commonly called ‘private’, and that of ‘political society’ or ‘the State’. These two levels correspond on the one hand to the function of ‘hegemony’ which the dominant group exercises throughout society and on the other hand to that of ‘direct domination’ or command exercised through the State and ‘judicial’ government (Gramsci et al., 1971).

Menurut pandangan Gramsci, konsekuensi dari kelas yang ter subordinasi dalam berjuang hanya dapat menjadi kelas yang hegemonik dengan membangun kapasitas dirinya untuk mengambil dukungan dari kekuatan sosial atau kelas lainnya (Gramsci et al., 1971). Hegemoni tidak hanya sekadar dominasi melalui kekerasan fisik atau paksaan hukum, melainkan lebih merupakan kepemimpinan intelektual dan moral yang dicapai melalui persetujuan aktif dari kelompok yang didominasi. Dalam konteks keluarga sakinah, konsep ini sering kali dipresentasikan sebagai norma yang alami, ideal, dan tak terbantahkan, sehingga menutupi relasi kuasa yang tidak setara di dalamnya. Hegemoni patriarki berfungsi untuk membentuk kesadaran kolektif di mana peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan perempuan sebagai pengikut atau pendukung dianggap sebagai sesuatu yang wajar, bahkan sebagai bagian dari kodrat atau takdir yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan berbagai institusi sosial dan budaya, seperti keluarga, sistem pendidikan, media massa, lembaga keagamaan, dan tradisi adat, yang secara konsisten mereproduksi dan melegitimasi nilai-nilai patriarkal dalam kehidupan sehari-hari. Melalui internalisasi nilai-nilai ini, individu, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa sadar turut serta dalam mempertahankan struktur kekuasaan yang tidak setara.

Dalam hal ini, perempuan yang menerima peran subordinatif dalam keluarga sakinah sering kali tidak menyadari bahwa mereka terjebak dalam struktur kekuasaan yang lebih besar yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Mereka mungkin merasa bahwa kepatuhan kepada suami adalah bagian dari ajaran Islam, sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan, atau sebagai cara untuk mencapai kebahagiaan dan keberkahan dalam rumah tangga, sehingga mengabaikan hak-hak mereka sendiri sebagai individu yang merdeka dan setara. Lebih jauh lagi, mereka mungkin menginternalisasi keyakinan bahwa perempuan secara alami lebih emosional, lemah, dan membutuhkan perlindungan, sehingga menerima posisi mereka sebagai "nomor dua" dalam keluarga.

Dengan demikian, hegemoni patriarki tidak hanya menciptakan ketidaksetaraan gender dalam keluarga sakinah, tetapi juga menghalangi perempuan untuk mengembangkan kesadaran kritis tentang posisi mereka dalam struktur sosial. Akibatnya, perempuan menjadi kurang mampu untuk menantang norma-norma yang menindas, memperjuangkan hak-hak mereka, atau membayangkan alternatif relasi gender yang lebih adil dan setara. Lebih jauh, hegemoni patriarki dapat memicu *false consciousness* atau kesadaran palsu, di mana perempuan justru mendukung atau membela sistem yang merugikan mereka, karena mereka percaya bahwa

sistem tersebut adalah yang terbaik bagi mereka atau bahwa tidak ada alternatif lain yang mungkin.

Hegemoni bukanlah proses yang statis dan tidak dapat diubah. Gramsci menekankan bahwa hegemoni selalu bersifat dinamis dan rentan terhadap tantangan dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Dalam konteks keluarga sakinah, munculnya gerakan feminisme Islam, peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan informasi, serta perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat modern telah membuka ruang bagi perempuan untuk mempertanyakan dan menantang hegemoni patriarki. Melalui kesadaran kritis, organisasi sosial, dan perjuangan politik, perempuan dapat merebut kembali agensi mereka dan membangun relasi gender yang lebih adil dan setara dalam keluarga dan masyarakat.

Relasi Kuasa Michel Foucault

Michel Foucault menawarkan pemahaman yang berbeda tentang kekuasaan dengan menekankan bahwa kuasa tidak hanya beroperasi melalui institusi formal atau tindakan represif, tetapi juga melalui mekanisme pengawasan dan disiplin sosial. Dalam konteks keluarga sakinah, menunjukkan bahwa perempuan diawasi oleh suami, keluarga besar, dan komunitas keagamaan. Pengawasan ini menciptakan mekanisme *self-surveillance*, di mana perempuan secara sukarela mengatur perilaku mereka agar sesuai dengan norma-norma sosial yang ada (Foucault, 1977).

Power must be analysed as something which circulates, or rather as something which only functions in the form of a chain. It is never localised here or there, never in anybody's hands, never appropriated as a commodity or piece of wealth. Power is employed and exercised through a net-like organisation. And not only do individuals circulate between its threads; they are always in the position of simultaneously undergoing and exercising this power. They are not only its inert or consenting target; they are always the elements of its articulation. In other words, individuals are the vehicles of power, not its point of application (Foucault, 1980).

Michel Foucault berpendapat bahwa dengan melihat bagaimana kuasa bekerja dan bagaimana kuasa digunakan dalam perspektif yang berbeda. Foucault memandang bahwa kuasa tidak melekat pada subyek sebagaimana dalam pandangan Lukes, maupun dalam struktur sosial maupun kelas sosial sebagaimana Parsons maupun Poulantzas. Bagi Foucault kuasa bukanlah sebuah fungsi kesadaran, kuasa eksis pada saat dijalankan/digunakan (*exercising*), yang dalam bahasa Foucault dikatakannya, “kuasa hanya eksis pada saat ia digunakan”(Foucault, 1982). Maka pandangan Foucault tentang kuasa secara garis besarnya adalah sebagai berikut: (1) kuasa ada di mana-mana, bukan karena ia merangkul apa saja, tetapi ia muncul dari mana-mana; (2) kuasa tidak bisa diperoleh, ditangkap, atau dibagi, karena itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki (*possessed*).

Pemahaman yang radikal berbeda tentang kekuasaan, menurut Foucault hal tersebut yang tidak lagi dipahami sebagai entitas yang terpusat dan represif, tetapi sebagai jaringan relasi yang meresap dan produktif. Foucault menekankan bahwa kuasa tidak hanya beroperasi melalui institusi formal seperti negara atau hukum, atau melalui tindakan represif seperti kekerasan fisik atau penindasan politik, tetapi juga melalui mekanisme pengawasan (*surveillance*) dan disiplin sosial (*discipline*) yang bekerja secara halus dan tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari (Foucault, 1977). Dalam pandangan Foucault, kekuasaan hadir di mana-mana, dalam setiap interaksi sosial, setiap praktik budaya, dan setiap bentuk pengetahuan. Dalam konteks interaksi sosial dan praktik budaya sebagai arena pembentukan kontruks sosial, kekuasaan memunculkan stigma yang buruk terhadap perempuan.

Diskursus keluarga sakinah menunjukkan bahwa perempuan diawasi dan didisiplinkan bukan hanya oleh suami sebagai figur otoritas formal, tetapi juga oleh keluarga besar, komunitas keagamaan, dan bahkan oleh diri mereka sendiri. Pengawasan ini tidak selalu bersifat langsung atau eksplisit, tetapi seringkali termanifestasi dalam bentuk norma-norma sosial, harapan-harapan budaya, dan tekanan-tekanan psikologis yang memaksa perempuan untuk menyesuaikan diri dengan standar perilaku yang telah ditetapkan. Misalnya, perempuan diharapkan untuk selalu menjaga penampilan, bersikap sopan dan santun, mengutamakan kepentingan keluarga di atas kepentingan pribadi, serta patuh dan setia kepada suami.

Pengawasan yang terus-menerus ini menciptakan mekanisme *self-surveillance*, di mana perempuan secara sukarela mengatur dan mengontrol perilaku mereka sendiri agar sesuai dengan norma-norma sosial yang ada. Mereka menginternalisasi standar-standar perilaku yang telah ditetapkan oleh masyarakat dan berusaha untuk memenuhi harapan-harapan tersebut, bahkan jika hal itu berarti mengorbankan kepentingan atau kebahagiaan mereka sendiri. Dengan demikian, perempuan tidak hanya menjadi objek kekuasaan, tetapi juga menjadi agen yang turut serta dalam mereproduksi dan mempertahankan sistem kekuasaan yang menindas mereka.

Foucault juga membahas bagaimana pengetahuan dan kekuasaan saling terkait erat. Dalam wacana patriarkal, pengetahuan tentang peran gender dan norma-norma keluarga sering kali dibangun dan disebarluaskan oleh otoritas agama dan budaya yang cenderung mendukung dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan. Pengetahuan ini kemudian digunakan untuk membenarkan dan melegitimasi ketidaksetaraan gender dalam keluarga sakinah. Misalnya, tafsir-tafsir agama yang menekankan kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, buku-buku panduan pernikahan yang mengajarkan perempuan untuk selalu patuh kepada suami, atau mitos-mitos budaya yang menggambarkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan emosional.

Dengan demikian, perempuan tidak hanya terpengaruh oleh kekuasaan eksternal yang dipaksakan oleh suami, keluarga, atau masyarakat, tetapi juga menginternalisasi norma-norma tersebut sehingga mereka merasa bahwa ketidaksetaraan adalah hal yang wajar, alami, atau bahkan sebagai bagian dari takdir yang harus diterima. Mereka mungkin percaya bahwa dengan menerima peran subordinatif dalam keluarga, mereka akan mendapatkan cinta, perlindungan, dan kebahagiaan. Namun, Foucault mengingatkan kita bahwa penerimaan norma-norma yang menindas ini justru merupakan bentuk kekuasaan yang paling efektif, karena membuat orang tanpa sadar turut serta dalam mempertahankan sistem yang merugikan mereka.

Seperti halnya hegemoni Gramsci, kekuasaan dalam pandangan Foucault juga bukanlah sesuatu yang mutlak dan tidak dapat diubah. Foucault menekankan bahwa di mana ada kekuasaan, di situ pula ada resistensi. Perempuan tidak selalu menjadi korban pasif dari kekuasaan patriarkal. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menantang, menegosiasikan, dan merekonstruksi peran mereka dalam keluarga. Melalui berbagai bentuk resistensi, baik yang terbuka maupun yang tersembunyi, perempuan dapat merebut kembali agensi mereka dan menciptakan ruang untuk relasi gender yang lebih adil dan setara dalam keluarga sakinah. Dengan mengintegrasikan kedua teori ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana konsep *keluarga sakinah* tidak hanya menjadi alat kontrol sosial yang mempertahankan dominasi laki-laki tetapi juga bagaimana perempuan bernegosiasi dengan wacana ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Melalui analisis ini, diharapkan dapat terungkap mekanisme di mana ideologi patriarkal dipertahankan dan direproduksi serta bagaimana perempuan dapat menemukan ruang untuk menantang dan mereformulasi peran mereka dalam keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Wacana Patriarki dalam Keluarga Sakinah

Hasil analisis menunjukkan bahwa wacana patriarki dalam keluarga sakinah dibangun melalui penekanan pada peran kepemimpinan laki-laki dan kepatuhan perempuan. Narasi ini disebarluaskan melalui berbagai medium, mulai dari khotbah keagamaan, buku panduan pernikahan Islam, hingga media sosial yang semakin memperkuat persepsi bahwa pernikahan ideal haruslah didasarkan pada hierarki gender yang tegas. Konstruksi ini membentuk realitas sosial di mana perempuan yang tunduk kepada suami dianggap sebagai istri yang baik, sementara mereka yang berusaha menegosiasikan posisinya seringkali dianggap sebagai penyimpang dari ajaran Islam.

Dalam perspektif Gramsci, hegemoni bekerja dengan cara membentuk *common sense* atau kesadaran kolektif yang membuat suatu gagasan diterima tanpa dipertanyakan (Gramsci et al., 1971). Sedangkan dalam konteks keluarga sakinah, hegemoni patriarki termanifestasi dalam penerimaan ide bahwa laki-laki memiliki hak dan otoritas lebih besar dalam rumah tangga. Perempuan yang menolak wacana ini seringkali dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, yang pada akhirnya membuat mereka terisolasi secara sosial (Mahmood, 2012).

Selain itu, narasi keluarga sakinah seringkali dikaitkan dengan ajaran tentang sabar dan ikhlas, yang dalam banyak kasus digunakan untuk menormalisasi ketimpangan dalam rumah tangga. Konsep ini diperkuat melalui kisah-kisah perempuan Muslim yang dianggap berhasil mempertahankan pernikahan mereka dengan menerima peran subordinatif tanpa mempertanyakan hak-hak mereka dalam rumah tangga (Butler, 2011). Namun, analisis wacana kritis mengungkapkan bahwa penekanan pada sabar dan ikhlas seringkali digunakan sebagai alat untuk membenarkan ketidakadilan gender dan mencegah perempuan untuk menuntut hak-hak mereka.

Lembaga pendidikan Islam juga berperan dalam mengkonstruksi konsep keluarga sakinah. Dalam banyak pesantren dan sekolah Islam, perempuan diajarkan bahwa ketaatan kepada suami adalah bentuk ibadah yang akan membawa keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Pendidikan ini membentuk persepsi perempuan tentang pernikahan sebagai institusi yang harus dijalani dengan kepatuhan mutlak kepada suami. Namun, penting untuk dicatat bahwa ada juga upaya dari beberapa lembaga pendidikan Islam untuk menawarkan perspektif yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

Peran ulama dalam membangun wacana patriarki dalam keluarga sakinah tidak dapat diabaikan. Tafsir-tafsir yang mengutamakan kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga lebih sering dikedepankan dibandingkan dengan interpretasi yang lebih egaliter (Barlas, 2009). Hal ini memperkuat struktur sosial di mana perempuan merasa bahwa kepatuhan adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Akan tetapi, muncul pula suara-suara dari kalangan ulama progresif yang menantang interpretasi patriarkal dan menawarkan perspektif yang lebih berimbang.

Tekanan sosial dalam komunitas Muslim juga berperan dalam membentuk persepsi perempuan tentang pernikahan. Dalam banyak kasus, perempuan yang mencoba mendiskusikan ulang peran gender dalam keluarga sering kali mendapat stigma sebagai individu yang tidak menghormati nilai-nilai Islam. Hal ini menyebabkan perempuan memilih untuk tetap berada dalam peran tradisional meskipun mereka merasa terbatas oleh sistem yang ada. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang hak-hak perempuan, semakin banyak perempuan Muslim yang berani untuk menantang norma-norma patriarkal dan memperjuangkan kesetaraan gender.

Di sisi lain, munculnya gerakan feminisme Islam mulai menantang dominasi wacana patriarki dalam keluarga sakinah. Para feminis Muslim berusaha menawarkan tafsir

alternatif yang lebih inklusif dan berkeadilan gender dalam memahami relasi suami-istri (Mernissi, 1991). Perempuan feminis percaya akan pentingnya otoritas dan kedaulatan pribadi perempuan atas kehidupan dan hak-hak mereka. Hidup dengan spiritualitas dan nuansa religius juga sering kali dihadapkan dengan ironi ketika ajaran agama digunakan untuk membenarkan perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan. Misalnya, ajaran tentang kesetiaan dan pengabdian dalam rumah tangga ditafsirkan secara sepihak untuk membatasi kebebasan perempuan atau istri. Selain itu, ironi lain muncul juga ketika karakter perempuan diharapkan menunjukkan kesalehan dan ketaatan yang tinggi pada suami dalam konteks agama, tetapi di sisi lain mereka dirampas hak-hak dasarnya untuk mengejar kehidupan yang mereka inginkan. Wacana ini perlahan mulai mendapat tempat di kalangan Muslim perkotaan yang lebih terbuka terhadap reinterpretasi teks agama. Gerakan ini berupaya untuk merekonstruksi konsep keluarga sakinah berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang.

2. Paradoks Relasi Kuasa dan Disiplin Perempuan dalam Rumah Tangga

Salah satu bentuk kontrol yang sering ditemui dalam keluarga sakinah adalah pembatasan ruang gerak perempuan. Banyak istri yang harus meminta izin suami sebelum melakukan aktivitas di luar rumah, termasuk bekerja, berorganisasi, atau sekadar bertemu dengan teman. Pembatasan ini bukan hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga menjadi bagian dari disiplin sosial yang diterapkan agar perempuan tetap berada dalam peran domestik. Dalam pandangan Islam, keluarga sakinah tidak dapat dibangun ketika hak-hak dasar pasangan suami istri dalam posisi yang tidak setara. Hubungan hierarkis pada umumnya dapat memicu munculnya relasi kuasa yang berpeluang pemegang kekuasaan menempatkan subordinasi dan marginalisasi terhadap yang dikuasai (Arma, 2018). Keberadaan istri dalam rumah tangga harus diperlakukan secara baik, dengan sikap egaliter tinggi sehingga tidak ada bias bahwa istri lebih rendah dari suami. Jika dalam kehidupan sekarang ini masih ada perlakuan buruk terhadap istri oleh suami, tindakan tersebut tidak mendapatkan legalitas dari siapapun, dari teks Alquran maupun dari penafsiran ulama terdahulu dan kemudian. Praktek itu dilakukan oleh segelintir orang yang kemudian menjadi pembenaran dalam Alquran (Adib, 2024). Analisis wacana kritis menunjukkan bahwa perempuan seringkali menemukan cara untuk menegosiasikan batasan-batasan ini dan memperjuangkan hak-hak mereka.

“Aku mengidamkan agar kaum perempuan belajar menilai apa pun dengan cara pandang mereka sendiri dan bukan melalui mata laki-laki”. Kutipan ini merupakan ungkapan kerinduan akan kreativitas yang kini terbelenggu dan sekaligus kepedihan perempuan sebagai akibat ketidakadilan gender. Betapa tidak menyakitkan, dalam upaya menggambarkan kebahagiaan dirinya, perempuan harus menoleh kepada laki-laki untuk bisa menemukan kata yang tepat dan disetujui. Ukuran keberhasilan hampir semua iklan produk kecantikan, pakaian, perlengkapan perempuan, selalu didasarkan pada kemampuan pemakaiannya memikat lelaki (Haryatmoko, 2010).

Untuk menyebut bagian-bagian tubuhnya, bahkan yang paling intim, perempuan memakai kata-kata yang dipilih oleh laki-laki. Dengan menguasai wacana, dominasi laki-laki terlihat normal dan wajar. Bahkan dalam situasi yang paling mengerikan dan tidak dapat ditolerir, itu mungkin tampak logis. Tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa representasi Tuhan terhadap jenis kelamin laki-laki adalah jelas, perempuan tinggal di rumah untuk mengurus anak dan rumah tangga dianggap normal. Di balik gagasan bahwa "Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki", telah terjadi pergeseran ideologis dari sejarah ke anggapan bahwa perempuan adalah sesuatu yang alamiah dan dari budaya ke anggapan bahwa perempuan adalah sesuatu yang sudah semestinya (Haryatmoko, 2010). Kedua hal itu berkembang menjadi legenda yang didukung oleh perdebatan yang dominan

oleh laki-laki. Mitos itu diterima dan ditopang oleh struktur sosio-budaya dan pengorganisasian masyarakat.

Pembagian kerja dalam bentuk tugas rumah tangga bagi perempuan dan aktivitas publik untuk laki-laki adalah perkembangan sejarah, maka masih bisa diubah, bukan sebagai tatanan kodrat. Memang, semua pencapaian lelaki tidak tertutup bagi perempuan, tetapi kalau diteliti secara kritis tujuannya ternyata didasarkan pada kepentingan dan nilai lelaki. Justru ketidakadilannya terletak pada kesan seakan-akan memberi kesempatan yang sama kepada perempuan. Dalam realitas masyarakat, norma moral yang terlalu rigoris cenderung mendorong perempuan untuk bersembunyi di dalam rumah. Biasanya dengan alasan melindungi perempuan, suatu norma atau hukum dibuat, tetapi akhirnya justru semakin membatasi dan memojokkan perempuan. Bagi perempuan, ruang publik menjadi semakin dipersempit sehingga kemampuan-kemampuan mereka kurang berkembang. Lebih parah lagi, sering pemberlakuan moral tidak didahului dengan diskusi dari berbagai pihak dan studi yang serius (Haryatmoko, 2010).

Penggunaan media sosial juga menunjukkan bagaimana relasi kuasa ini terus berkembang dalam bentuk baru. Banyak akun media sosial berbasis Islam yang menekankan pentingnya peran istri sebagai pengasuh dan penjaga rumah tangga tanpa memberi ruang bagi diskusi tentang peran laki-laki dalam kerja domestik. Hal ini menunjukkan bahwa wacana patriarki tidak hanya direproduksi dalam interaksi langsung, tetapi juga melalui media digital. Akan tetapi, media sosial juga menjadi platform bagi perempuan Muslim untuk berbagi pengalaman, menantang norma-norma patriarkal, dan membangun solidaritas.

Dalam konteks globalisasi, diskursus tentang kesetaraan gender dalam Islam semakin berkembang, tetapi resistensi terhadap perubahan juga semakin kuat. Beberapa negara Muslim telah mulai memperkenalkan kebijakan yang lebih inklusif terhadap perempuan dalam rumah tangga, seperti reformasi hukum keluarga di Tunisia dan Maroko (Charrad, 2001). Namun, di negara-negara lain, wacana patriarki masih sangat dominan dan sulit untuk ditantang. Oleh karena itu, penting untuk terus mengadvokasi kesetaraan gender dan mereformasi hukum keluarga yang diskriminatif.

Secara keseluruhan, konsep keluarga sakinah yang idealnya berlandaskan keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota keluarga justru seringkali menjadi alat untuk memperkuat dominasi laki-laki dalam rumah tangga. Dengan menggunakan teori Gramsci dan Foucault, dapat dilihat bahwa konsep ini tidak hanya bekerja melalui paksaan, tetapi juga melalui mekanisme internalisasi dan pengawasan sosial yang membuat perempuan merasa bahwa ketimpangan dalam rumah tangga adalah sesuatu yang wajar dan harus diterima. Namun, penting untuk diingat bahwa perempuan bukanlah penerima pasif dari wacana patriarki. Mereka memiliki kemampuan untuk menantang, menegosiasikan, dan merekonstruksi peran mereka dalam keluarga.

PENUTUP

Kesimpulan

Konsep keluarga sakinah, meskipun idealnya berlandaskan keadilan dan kesejahteraan, seringkali menjadi alat untuk memperkuat dominasi laki-laki. Analisis dengan teori Gramsci dan Foucault menunjukkan bahwa konsep ini bekerja melalui internalisasi dan pengawasan sosial, membuat perempuan merasa bahwa ketimpangan adalah wajar. Namun, perempuan tidak pasif; mereka mampu menantang, bernegosiasi, dan merekonstruksi peran mereka dalam keluarga. Gerakan feminisme Islam memainkan peran penting dalam menawarkan visi keluarga sakinah yang lebih adil dan setara. Penelitian ini menyoroti pentingnya dekonstruksi wacana patriarkal dan pemberdayaan perempuan dalam keluarga Muslim. Diharapkan, penelitian ini

dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika relasi kuasa gender dalam keluarga Muslim.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Paradoks Keluarga Sakinah: Relasi Kuasa dan Wacana Patriarki” maka penulis dapat memberikan saran untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang terkait dengan tema relasi kuasa dan wacana patriarki, serta mencoba untuk meneliti objek-objek lain dan variabel-variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, A. (2024). Pemikiran Aminah Wadud tentang Relasi Kuasa dalam Rumah Tangga. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 7(1). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li>.
- Ahmed, L. (2021). *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. Yale University Press.
- Ardiansyah. (2024). *Ortodoksi Hukum Keluarga Islam di Ruang Digital (Studi Pemikiran tentang Aisah Dahlan tentang Relasi Suami Istri)* [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Arma, M. (2018). Keluarga Sakinah Berwawasan Gender. *Muwazah*, 9(2), 178–187. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v9i2.1128>
- Barlas, A. (2009). *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Butler, J. (2011). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Taylor & Francis.
- Charrad, M. (2001). *States and Women's Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco*. University of California Press.
- Fairclough, N. (1995). *Media Discourse*. E. Arnold.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Vintage Books.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977*. Knopf Doubleday Publishing Group.
- Foucault, M. (1982). The Subject and Power. In *The Essential Foucault. Critical Inquiry*, 8(4), 777–795.
- Gramsci, A., Hoare, Q., & Nowell-Smith, G. (1971). *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*. International Publishers.
- Haryatmoko, J. (2010). *Dominasi penuh muslimat: akar kekerasan dan diskriminasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayatullah, A. A. (2014). *Feminist Edges of the Qur'an*. Oxford University Press.
- Mahmood, S. (2012). *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. Princeton University Press.
- Mernissi, F. (1991). *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Basil Blackwell.
- Rahmawati, D., Islam, U., & Sunan, N. (2025). Konstruksi Makna Pernikahan pada Kalangan Muslim Gen Z di Media Sosial : Studi Kasus Penonton Konten “ Marriage is Scary ” di TikTok. *MUKADIMAH Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 82–94. <https://doi.org/https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mkd/article/view/10405/7464>
- Rehman, S., Mir-Hosseini, Z., Al-Sharmani, M., & Rumminger, J. (2022). Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition A Feminist Reader's Guide to *MUSAWAH for Equality in The Family*, 1–63.
- Vianita, P., Haris, M., & Rahman, T. (2024). *Feminisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*. 2(2), 74–83.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.

